

**DETERMINAN *DIGITAL LOCAL GOVERNMENT TRANSPARENCY*
PROVINSI JAWA TENGAH**

**Skripsi
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Derajat Sarjana S1
Program Studi Akuntansi**



Disusun oleh:

Meltri Nugraheni

NIM 31402400039

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2025

SKRIPSI

DETERMINAN *DIGITAL LOCAL GOVERNMENT TRANSPARENCY* PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh :

Meltri Nugraheni

NIM : 31402400039

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya

dapat diajukan kehadapan sidang panitia Ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Agustus 2025

Dosen Pembimbing,

UNISSULA

جامعة السلطان اگونغ

Provita Wijayanti,S.E.,M.Si.,Ak., CA.,IFP.,AWP.,PhD

NIK. 211403012

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

DETERMINAN *DIGITAL LOCAL GOVERNMENT TRANSPARENCY* PROVINSI JAWA TENGAH

Disusun Oleh :

Meltri Nugraheni

NIM : 31402400039

Telah disetujui oleh dosen pembimbing dan selanjutnya
dapat diajukan kepada Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 13 Agustus 2025

Ketua Program Studi,

Dosen Pembimbing,



Provita Wijayanti,S.E.,M.Si.,Ak., CA.,IFP.,AWP.,PhD
NIK. 211403012

Provita Wijayanti,S.E.,M.Si.,Ak., CA.,IFP.,AWP.,PhD
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Meltri Nugraheni

NIM : 31402400039

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi UNISSULA

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya dengan judul :

“Determinan Digital Local Government Transparency Provinsi Jawa Tengah”.

Merupakan hasil karya sendiri (bersifat original), bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia untuk dicabut gelar yang telah saya peroleh.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Semarang, 18 Mei 2025

Yang Menyatakan,

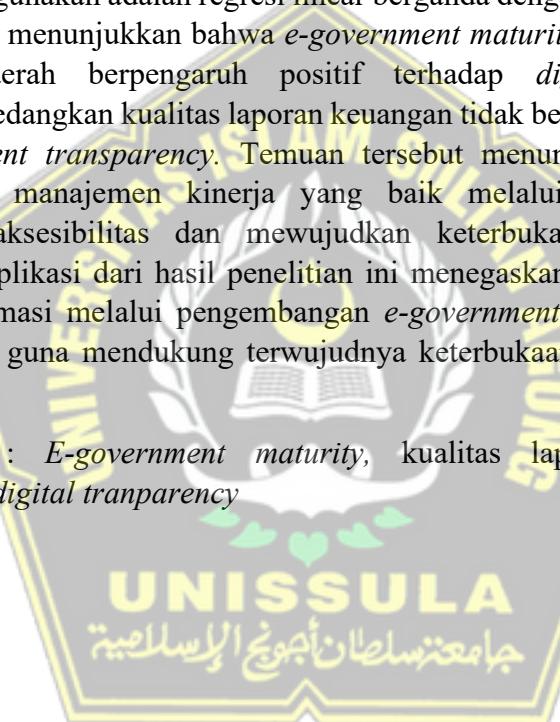


Meltri Nugraheni
NIM. 31402400039

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency* di Provinsi Jawa Tengah. Pendekatan penelitian yaitu kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari situs web resmi pemerintah daerah, laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas pemerintah daerah. Sampel pada penelitian ini adalah 36 pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi pada tahun 2022-2023. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan bantuan *software SPSS*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *e-government maturity* dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*, sedangkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *digital local government transparency*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyajian informasi dan manajemen kinerja yang baik melalui pemanfaatan teknologi memudahkan aksesibilitas dan mewujudkan keterbukaan pemerintah terhadap masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi melalui pengembangan *e-government* serta manajemen kinerja yang akuntabel guna mendukung terwujudnya keterbukaan informasi publik secara digital.

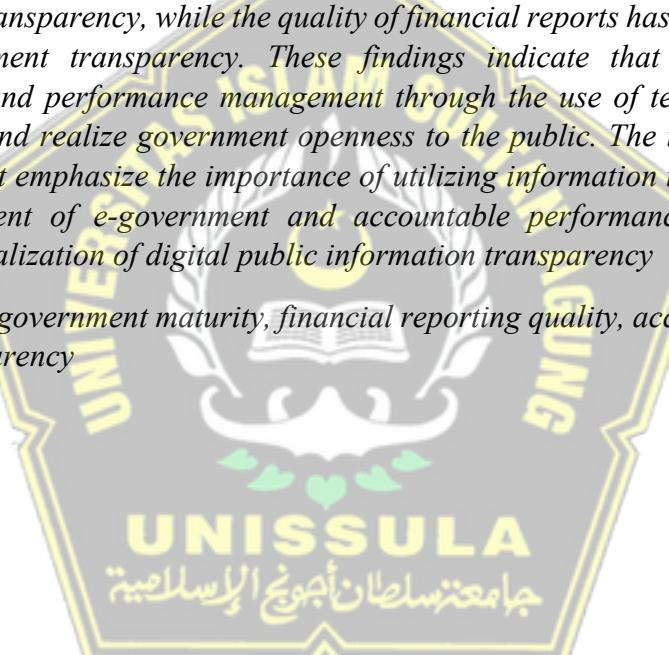
Kata Kunci : *E-government maturity*, kualitas laporan keuangan, sistem akuntabilitas, *digital transparency*



ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of e-government maturity, financial report quality, and local government accountability systems on digital local government transparency in Central Java Province. The research approach is quantitative, using secondary data obtained from official local government websites, financial reports, and local government accountability reports. The sample in this study was 36 local governments in Central Java Province, consisting of district, city, and provincial governments in 2022-2023. The analysis technique used was multiple linear regression with the help of SPSS software. The results show that e-government maturity and local government accountability systems have a positive effect on digital local government transparency, while the quality of financial reports has no effect on digital local government transparency. These findings indicate that good information presentation and performance management through the use of technology facilitate accessibility and realize government openness to the public. The implications of this research result emphasize the importance of utilizing information technology through the development of e-government and accountable performance management to support the realization of digital public information transparency

Keywords : E-government maturity, financial reporting quality, accountability system, digital transparency



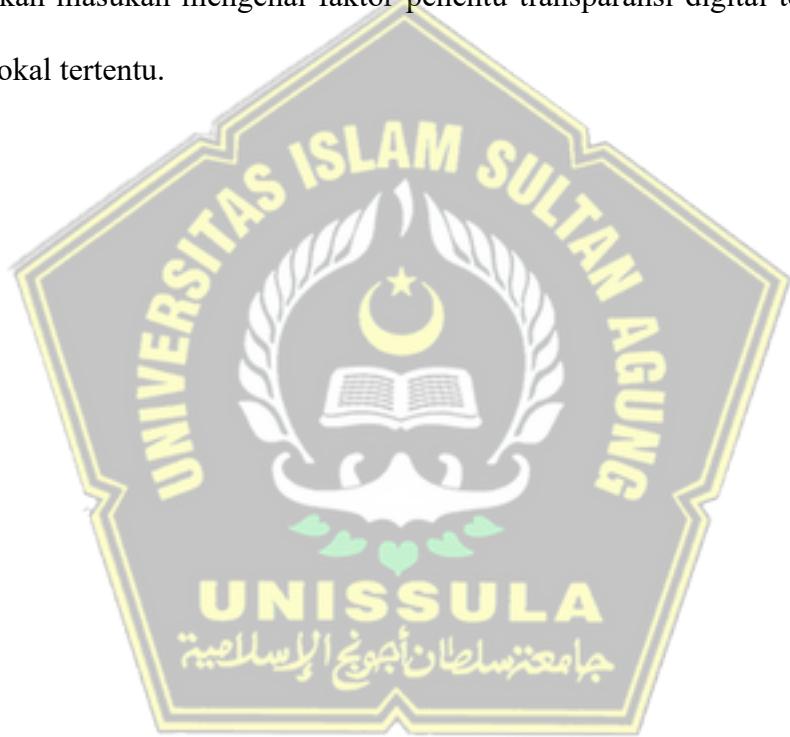
INTISARI

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis pengaruh *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency*. *Grand theory* yang digunakan pada penelitian ini adalah teori keagenan (*agency theory*). Penelitian ini memiliki 3 hipotesis yang terdiri dari : *e-government maturity* berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*; kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*; sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*.

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023. Pengambilan sampel ditentukan dengan *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling* dan didapatkan 72 sampel, namun terdapat 4 data *outlier* sehingga diperoleh 68 sampel data yang diolah. Teknik pengujian pada penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS 25. Berdasarkan pengajuan hipotesis pada penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa *e-government maturity* dan kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*, sedangkan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *digital local government transparency*.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu adanya beberapa situs web pemerintah daerah yang tidak dapat diakses sewaktu-waktu sehingga hal ini menjadi

tantangan dalam memperoleh data. Selain itu, pengukuran *e-government maturity* dan *digital transparency* menggunakan *scoring* sehingga dapat bersifat subjektif dari perspektif peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penentu transparansi digital yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan beberapa faktor, serta melakukan studi di wilayah yang berbeda sehingga dapat memberikan masukan mengenai faktor penentu transparansi digital tergantung pada kondisi lokal tertentu.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan baik. Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi Skripsi dalam rangka menyelesaikan studi Strata Satu untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan Skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa pertolongan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan hamnya-Nya dalam segala urusan.
2. Orang tua penulis serta keluarga besar yang tiada henti memberi dorongan, doa, dan motivasi selama proses penulisan Skripsi.
3. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
4. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP, selaku Ketua Program Studi S-1 Akuntansi Universitas Islam Sultan Agung sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia memberikan waktu serta bimbingan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Staff dan Karyawan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah membimbing dan memberikan ilmu kepada penulis selama perkuliahan.
6. Sahabat dan teman-teman yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan Skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih ada keterbatasan dan kekurangan yang dimiliki dalam penyusunan Skripsi ini tetapi penulis berharap Skripsi ini membawa manfaat dan menambah wawasan bagi berbagai pihak. Penulis menantikan kritik dan saran yang membangun agar Skripsi dan penulis menjadi lebih baik kedepannya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 18 Mei 2025

Penulis,



Meltri Nugraheni

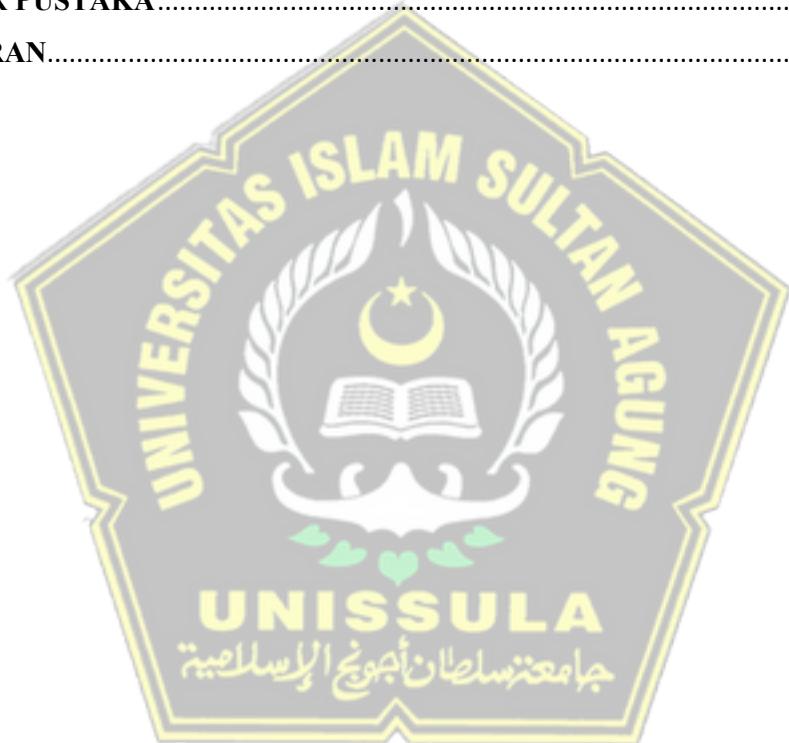
NIM. 31402400039

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Pertanyaan Penelitian	9
1.4 Tujuan Penelitian	9
1.5 Manfaat Penelitian	10
BAB II	12
2.1 Kajian Pustaka.....	12
2.1.1 Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	12
2.1.2 Teori Legitimasi (<i>Legitimacy Theory</i>).....	13
2.1.3 Tata Kelola yang Baik (<i>Good Governance</i>).....	14
2.1.4 <i>E-government maturity</i>	14
2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan	16
2.1.5 Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	17
2.2 Penelitian Terdahulu	18
2.3 Pengembangan Hipotesis	23

2.3.1 Pengaruh <i>E-government maturity</i> Terhadap <i>Digital Local Government Transparency</i>.....	23
2.3.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap <i>Digital Local Government Transparency</i>	24
2.3.3 Pengaruh Sistem Akuntabilitas Terhadap <i>Digital Local Government Transparency</i>.....	26
2.4 Kerangka Konseptual.....	27
BAB III.....	28
3.1 Jenis Penelitian	28
3.2 Populasi dan Sampel	28
3.2.1 Populasi	28
3.2.2 Sampel	28
3.3 Jenis dan Sumber Data	29
3.4 Metode Pengumpulan Data	29
3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel	29
3.5.1 Variabel Dependen (Y)	30
3.5.2 Variabel Independen (X)	31
3.5.3 Variabel Kontrol	33
3.6 Teknik Analisis Data	35
3.6.1 Uji Statistik Deskriptif.....	35
3.6.2 Uji Asumsi Klasik.....	35
3.6.3 Model Regresi Linear Berganda.....	37
3.6.4 Uji <i>Goodness of Fit</i>Model.....	38
3.6.5 Uji Hipotesis	39
BAB IV.....	41
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	41
4.2 Uji Statistik Deskriptif	41
4.3 Analisis Data	45
4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik.....	45
4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda	49
4.3.3 Hasil Uji Godness of Fit Model	52

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis	54
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian	56
BAB V	61
 5.1 Simpulan	61
 5.2 Implikasi	62
 5.3 Keterbatasan Penelitian	63
 5.4 Agenda Penelitian Mendatang.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	67



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3. 1 Indikator Transparansi Digital Pemerintah Daerah	31
Tabel 3. 2 Indikator E-Government Maturity	32
Tabel 3. 3 Indikator Sistem Akuntabilitas Pemerintah	33
Tabel 3. 4 Indikator Kekayaan Pemerintah Daerah	34
Tabel 3. 5 Indikator Ukuran Pemerintah Daerah	34
Tabel 4. 1 Tingkat Pemerintah Daerah di Jawa Tengah	41
Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif.....	42
Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif setelah Penghilangan Outlier.....	42
Tabel 4. 4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov	45
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov setelah Penghilangan Outlier	46
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas.....	47
Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi	49
Tabel 4. 8 Hasil Analisis Linear Berganda	49
Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi	52
Tabel 4. 10 Hasil Uji F	53
Tabel 4. 11 Hasil Uji T.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023	2
Gambar 1. 2 Sepuluh Provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.....	3
Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual	27
Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas	48



DAFTAR LAMPIRAN



BAB I

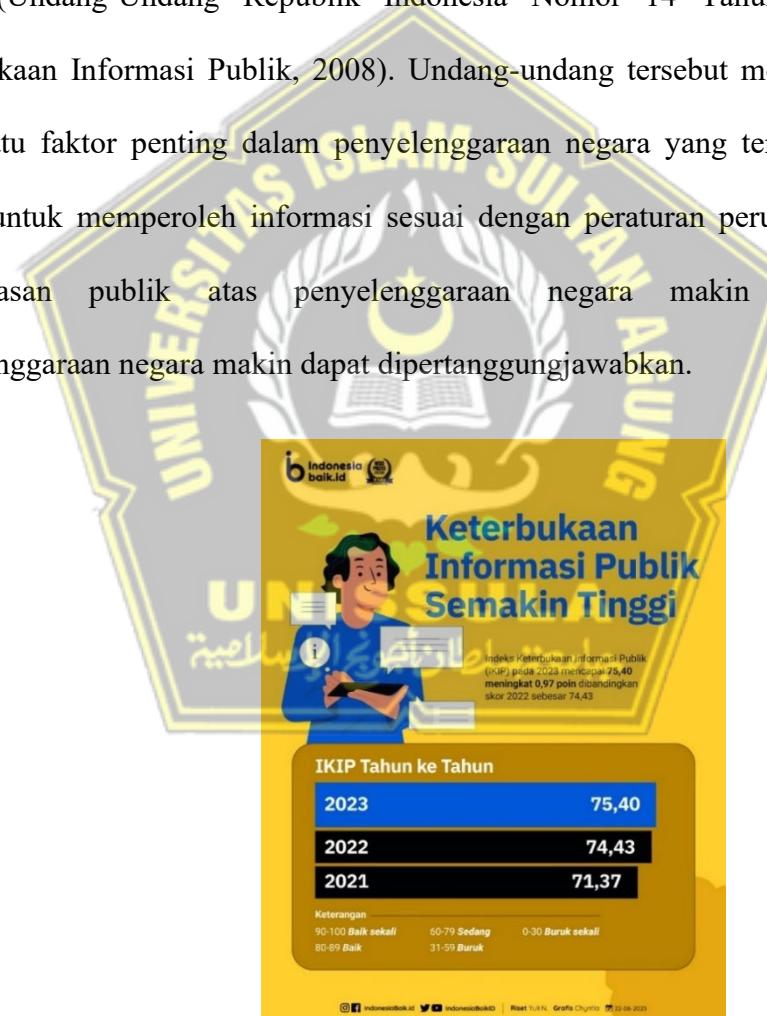
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pemerintah daerah sebagai pelaksana urusan pemerintahan di tingkat daerah memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan *good governance* kepada masyarakat. Perkembangan era globalisasi di dunia memberikan dampak yang signifikan, terutama dalam kemajuan teknologi informasi di berbagai sektor, termasuk dalam pengelolaan keuangan di lembaga pemerintahan. Adanya perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada pemerintah meningkatkan tuntutan masyarakat terhadap kinerja pemerintah untuk menghasilkan pemerintah yang berprinsip *good governance*. Terdapat dua unsur pokok dalam mewujudkan *good governance* yaitu transparansi dan akuntabilitas (Mardiasmo, 2006).

Prinsip transparansi mengandung makna terbukanya informasi administrasi publik. Transparansi diyakini memiliki dampak positif terhadap peningkatan akuntabilitas pemerintah serta mendorong penyebaran informasi yang lebih luas kepada masyarakat mengenai kebijakan dan kinerja pemerintah(Wu et al., 2017). Transparansi dan keterbukaan informasi dapat membangun kepercayaan masyarakat serta mengurangi penyimpangan terhadap tata kelola pemerintahan dalam pengelolaan keuangan negara.

Di era digital ini, teknologi informasi memiliki peran dalam memudahkan akses terhadap informasi publik yang menciptakan adanya transparansi digital. Transparansi digital dalam pemerintahan menjadi sangat penting karena memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi, mengevaluasi, dan ikut serta dalam proses pemerintahan. Tuntutan masyarakat mengenai keterbukaan informasi telah diatur dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, 2008). Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengawasan publik atas penyelenggaraan negara makin terbuka, maka penyelenggaraan negara makin dapat dipertanggungjawabkan.



Gambar 1. 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik tahun 2023

Tingkat penerapan keterbukaan informasi publik di Indonesia dapat diukur melalui perolehan skor Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) yang diterbitkan oleh Komisi Informasi Pusat setiap tahunnya. Berdasarkan laporan KIP periode tahun 2021-2023, nilai IKIP Indonesia mengalami peningkatan dengan perolehan skor tahun 2023 adalah sebesar 75,40 yang masuk pada kategori sedang. Skor tersebut meningkat 0,97 poin dibandingkan skor pada tahun 2022 yang hanya sebesar 74,43.



Gambar 1. 2 Sepuluh Provinsi dengan Indeks Keterbukaan Informasi Publik

Berdasarkan hasil penilaian IKIP tahun 2023, Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam 10 besar provinsi dengan perolehan skor IKIP tertinggi secara nasional. Perolehan skor IKIP Provinsi Jawa Tengah masuk ke dalam kategori “Baik” dengan

skor 82,05 pada tahun 2025. Namun pada praktiknya, keterbukaan informasi publik di Jawa Tengah masih menghadapi berbagai kendala yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat. Masyarakat dapat mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi (KI) Jawa Tengah apabila terjadi keberatan. Berdasarkan laporan tahunan KI Jawa Tengah 2023, terdapat sebanyak 100 (seratus) sengketa informasi publik dengan puncaknya pada bulan Agustus dan November. OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi badan publik yang paling banyak disengketakan yaitu sebanyak 45 institusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa layanan PPID belum optimal yang disebabkan kurangnya koordinasi internal dalam pengelolaan informasi sebagaimana tercemin dalam laporan tahunan PPID.

Transparansi digital dalam pemerintah daerah menjadi isu yang penting pada era digitalisasi saat ini. Di Indonesia khususnya di Jawa Tengah, masyarakat menuntut pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas mengenai pengelolaan sumber daya publik. Pesatnya perkembangan teknologi informasi menjadi tantangan bagi pemerintah untuk memanfaatkannya dalam penyelenggaraan pemerintahan, tidak hanya untuk meningkatkan legitimasi pemerintah tetapi juga untuk meminimalkan adanya potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, atau pengelolaan sumber daya yang buruk. Penerapan *e-government* di Provinsi Jawa Tengah diatur pada (Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2022). Peraturan tersebut menjadi langkah strategis

untuk mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Sebagaimana dijelaskan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* mewajibkan setiap organisasi publik seperti pemerintah pusat maupun pemerintah di daerah untuk membuat dan merancang, melakukan pengembangan serta menerapkan sistem informasi *e-government* yang tepat dan berkualitas sebagai sarana penyaluran informasi kepada publik. *E-government* dianggap mampu untuk meningkatkan transparansi pemerintah dan mengurangi korupsi (Lupu & Lazăr, 2015). Keberhasilan penerapan *e-government* diukur dengan melakukan pengamatan masing-masing situs *website* pemerintah daerah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) yang menyatakan bahwa *e-government maturity* terbukti berdampak positif pada tingkat transparansi digital pemerintah daerah. Namun dalam penelitian tersebut juga ditemukan beberapa situs *website* pemerintah daerah tidak sepenuhnya dapat diakses sehingga menghambat dalam memperoleh beberapa data. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Shabihah et al., 2025) menyatakan bahwa implementasi *e-government* yang ditandai dengan integrasi sistem digital dan inovasi aplikasi publik berkontribusi dalam meningkatkan transparansi digital pemerintah daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Nurindahsari et al., 2022) yang meneliti mengenai pengaruh sistem *e-government* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah, menemukan

hasil yang tidak signifikan. Pada penelitian yang terdahulu, sebagian besar meneliti faktor seperti *e-government* terhadap transparansi pengelolaan keuangan daerah atau transparansi informasi keuangan daerah. Hal ini belum mencakup transparansi digital pemerintah daerah secara menyeluruh yang menjadi fokus pada penelitian ini yang meliputi aspek keterbukaan informasi publik, layanan digital, dan akses data berbasis digital.

Kualitas laporan keuangan merupakan indikator penting yang menggambarkan seberapa baik pemerintah daerah dalam menyajikan informasi keuangan. (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2010) menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki apabila memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Kualitas laporan keuangan pemerintah yang baik akan memungkinkan untuk mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hal ini dapat dikatakan bahwa laporan keuangan disajikan dan diungkapkan secara wajar serta tidak terjadi kesalahan yang material dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan dan mendukung transparansi.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah berhasil mempertahankan opini WTP yang ke-13 secara berturut-turut. Berdasarkan capaian tersebut, BPK masih tetap menemukan permasalahan terkait pengelolaan keuangan daerah yang harus ditindaklanjuti. Temuan tersebut menunjukkan adanya potensi masalah terhadap

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dapat menjadi hambatan bagi terwujudnya transparansi. Temuan BPK tersebut menjadi evaluasi sekaligus menjadi upaya perbaikan tata kelola yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Adiputra et al., 2018) menunjukkan adanya hubungan antara kualitas laporan keuangan dengan tingkat transparansi pemerintah daerah. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan secara signifikan positif memengaruhi transparansi digital. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Zulva et al., 2020) menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu opini auditor tidak berpengaruh transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.

Kualitas sistem akuntabilitas pemerintah daerah juga memainkan peran penting dalam transparansi penyelenggaraan pemerintah. Hubungan positif antara pemerintah dan masyarakat dibina melalui peran akuntabilitas pemerintah (Yuesti et al., 2022). Sistem akuntabilitas yang baik memastikan bahwa setiap tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) menyatakan bahwa Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah (SAKT) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap transparansi, hal ini menunjukkan bahwa sistem akuntabilitas yang kuat dapat transparansi pemerintah daerah.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu melihat pengaruh *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah di seluruh pemerintah daerah di Indonesia, sedangkan penelitian ini melihat pengaruh *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2022 sampai dengan 2023. Provinsi Jawa Tengah dipilih agar penelitian lebih memberikan fokus yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap karakteristik spesifik pemerintah daerah tersebut. Penelitian untuk level suatu pemerintah daerah belum banyak dikaji secara mendalam terhadap konteks lokal yang memiliki dinamika tersendiri sehingga dapat dilakukan perbandingan antar daerah. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol yaitu kekayaan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah untuk mengendalikan pengaruh faktor-faktor sumber daya dan kapasitas organisasi yang dapat memengaruhi transparansi digital pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai peran *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah, yang dituangkan dalam penelitian yang berjudul “Determinan *Digital Local Government Transparency* Provinsi Jawa Tengah”.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi *digital local government transparency* di Provinsi Jawa Tengah. Adapun masalah yang dihadapi meliputi beberapa situs web pemerintah daerah tidak sepenuhnya dapat

diakses, sehingga mengurangi aksesibilitas terhadap data yang diperlukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu mengenai transparansi pemerintah daerah yang dipengaruhi oleh *e-government* dan kualitas laporan keuangan menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah pada penelitian adalah bagaimana pengaruh *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap *digital local government transparency* di Provinsi Jawa Tengah.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut:

- 1) Apakah *e-government maturity* berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*?
- 2) Apakah kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*?
- 3) Apakah sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Menguji dan menganalisis pengaruh *e-government maturity* terhadap *digital local government transparency*
- 2) Menguji dan menganalisis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap *digital local government transparency*
- 3) Menguji dan menganalisis pengaruh sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency*

1.5 Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur yang ada mengenai *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency*. Selain itu, diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *digital local government transparency* sehingga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya.

- 2) Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi para pembuat kebijakan untuk merancang strategi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah.
- b. Adanya penelitian ini yaitu memberikan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi transparansi, pemerintah daerah dapat

mengembangkan sistem *e-government* yang lebih baik sehingga dapat meningkatkan kualitas layanan publik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan pertama kali dikemukakan oleh (Jensen & Meckling, 1976) merupakan hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu prinsipal dan agen. Pada sektor pemerintahan, hubungan tersebut tercermin dari masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada pemerintah. Kemudian pemerintah bertindak sebagai agen yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik secara akuntabel sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat(Saraswati et al., 2019).

Teori keagenan menegaskan tanggung jawab pemerintah daerah sebagai wakil masyarakat untuk memenuhi harapan dari masyarakat(Adiputra et al., 2018). Pemerintah sebagai pihak yang memberikan pelayanan publik, menguasai informasi yang digunakan sebagai dasar dalam pembuatan kebijakan, memiliki potensi kebijakan yang hanya mementingkan pemerintah dan mengabaikan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengurangi permasalahan yang terjadi, pemerintah daerah harus berupaya meningkatkan transparansi dalam menyediakan informasi dan menyajikan laporan keuangan yang berkualitas.

Transparansi digital dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam menyediakan informasi dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pengungkapan informasi melalui internet dapat meningkatkan fungsi pengawasan dari masyarakat. Mekanisme pengawasan terhadap pemerintah dapat dilakukan dengan adanya penerapan *e-government* dan penyusunan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga masyarakat dapat mengevaluasi kinerja pemerintah secara lebih objektif. Sehingga bentuk pertanggungjawaban pemerintah tersebut dapat mengurangi asimetri informasi dalam hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah menjadi agen.

2.1.2 Teori Legitimasi (*Legitimacy Theory*)

Teori legitimasi memiliki peran penting dalam keberlangsungan pemerintah. Teori ini menekankan pentingnya kesesuaian dengan norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Teori legitimasi digunakan dalam hubungan antara pemerintahan dengan masyarakatnya agar pemerintah dapat berkembang sesuai dengan kebaikan dan kebutuhan masyarakatnya (Zulva et al., 2020) Pengungkapan segala bentuk dokumen informasi keuangan dapat menjadi pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana proses aktivitas pemerintah dan juga hasilnya.

Teori legitimasi digunakan untuk memberikan dasar atau alasan pemerintah daerah perlu untuk menyampaikan informasi keuangan kepada publik melalui situs web resmi masing-masing pemerintah daerah. Salah satu upaya yang dapat dilakukan

adalah melakukan pengungkapan informasi dengan memanfaatkan fasilitas internet dalam bentuk situs web (Sinaga, 2011).

2.1.3 Tata Kelola yang Baik (*Good Governance*)

Good governance dapat diartikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut World Bank (1992), *good governance* adalah cara pengelolaan negara atau organisasi yang menjamin pelaksanaan kebijakan secara transparan, akuntabel, serta partisipatif, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), salah satu ciri utama tata kelola pemerintahan yang baik adalah transparansi (Mardiasmo, 2018). Transparansi menjadi aspek penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik karena memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memantau penyelenggaraan pemerintahan karena adanya keterbukaan informasi publik. Dengan adanya transparansi, pemerintah dapat meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan di masyarakat.

2.1.4 *E-government maturity*

Perkembangan teknologi yang semakin maju mendorong pemerintah untuk menerapkan *e-government* guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Implementasi *e-government* digunakan untuk menyampaikan hasil kinerja pemerintah, baik informasi keuangan maupun non keuangan. Penerapan ini memungkinkan

masyarakat untuk mengakses laporan dan rencana kebijakan pemerintah melalui platform *e-government* yang disediakan oleh pemerintah. Hal ini sejalan dengan (Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, 2005), yang mewajibkan informasi keuangan daerah tersedia di situs resmi pemerintah daerah. Dengan demikian, *e-government* berperan dalam mendukung transparansi dan mengurangi tindakan korupsi(Adiputra et al., 2018).

Pembangunan sistem informasi yang baik diperlukan untuk memulai penggunaan *e-government*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan(Fietkiewicz et al., 2017) oleh *e-government maturity* dapat diperoleh melalui 5 pilar yang disebutkan sebagai berikut:

a. Pilar 1 : Diseminasi Informasi (Katalog)

Pada pilar ini pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap, akurat, dan mudah diakses oleh public dalam *e-government*. Aksesibilitas *e-government* yang cepat dan mudah tentunya sangat berpengaruh penting dalam kematangan sebuah *e-government*.

b. Pilar 2 : Komunikasi

Komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat secara real time sangat penting dalam kematangan suatu *e-government*.

c. Pilar 3 : Transaksi

E-government yang matang harus memiliki system layanan *financial* ataupun *non-financial* yang dapat mengurangi ketergantungan pada proses manual yang memakan waktu.

d. Pilar 4 : Interoperabilitas (Integrasi)

E-government yang matang harus memiliki teknologi informasi yang terintegrasi, sehingga data dapat dipertukarkan dengan mudah dan aman di antara sistem yang berbeda.

e. Pilar 5 : Partisipasi

E-government yang matang harus memfasilitasi partisipasi aktif masyarakat dalam pembuatan kebijakan, seperti melalui survey online, forum publik, atau konsultasi daring.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan

Persyaratan normatif yang harus dipenuhi agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan adalah kualitas laporan keuangan. Menurut (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), 2010), laporan keuangan dapat dikatakan memenuhi kualitas yang dikehendaki jika memenuhi karakteristik laporan keuangan yaitu:

a. Relevan

Informasi laporan keuangan dianggap relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, dapat dipercaya dan dapat diverifikasi.

c. Dapat Dibandingkan

Informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dari waktu ke waktu, serta antara entitas yang berbeda

d. Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

Jika laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan memenuhi kualitas laporan keuangan, maka akan mendapatkan opini yang baik dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan menggunakan SAP berbasis akrual. Penerapan standar akuntansi berbasis akrual memungkinkan untuk menyajikan gambaran informasi keuangan yang lebih realistik dan akurat mengenai posisi dan kinerja keuangan pemerintah. Pada laporan keuangan pemerintah daerah wajib untuk dilakukan audit oleh BPK. Hasil audit berupa opini audit akan memberikan informasi tentang kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah. Kualitas laporan keuangan dapat dievaluasi berdasarkan opini audit pada laporan keuangan pemerintah (Wilopo, 2017).

2.1.5 Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah

bentuk pertanggungjawaban dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah melalui penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem akuntabilitas pemerintah merupakan kerangka yang mengatur pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini mencakup berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.

Pemerintah dapat memastikan kredibilitasnya dan meningkatkan kepercayaan publik dengan menerapkan sistem akuntabilitas yang baik. Hal itu dapat meningkatkan transparansi pemerintah daerah dengan menyediakan informasi yang tepat, cepat, dan mudah diakses. Dalam instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 menyatakan bahwa tujuan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas yang merupakan salah satu syarat untuk terciptanya *good governance*.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

Penulis, Tahun	Variabel	Sampel dan Metode Analisis	Hasil
Muhammad Fadhlly Rizky Octavio & Dekar Urumsah (2024)	Variabel Independen : 1. <i>E-government maturity</i> 2. Kualitas laporan keuangan	Sampel : Situs web resmi, laporan akuntabilitas, dan laporan keuangan 541 pemerintah provinsi dan	<i>E-government maturity</i> , Kualitas laporan keuangan, dan Sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi digital.

	<p>3. Sistem akuntabilitas pemerintah daerah</p> <p>Variabel Dependen : Transparansi digital pemerintah daerah</p>	<p>kabupaten/kota di Indonesia</p> <p>Metode Analisis : Analisis regresi berganda</p>	
Bayu Aji Faundra Pratama (2023)	<p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kekayaan pemerintah daerah 2. Ukuran pemerintah daerah 3. Kualitas laporan keuangan 4. <i>Maturity e-government</i> <p>Variabel Dependen : Transparansi informasi keuangan pemerintah daerah di Indonesia</p>	<p>Sampel : 541 website pemerintah daerah dan laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2021</p> <p>Metode Analisis : Analisis regresi berganda, Statistik Deskriptif dan Uji Asumsi Klasik</p>	<p>1. Kekayaan pemerintah daerah, Kualitas laporan keuangan, <i>Maturity e-government</i> berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah</p> <p>2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah.</p>
Ramadan Syahril Basri, Saiful Amri, Radhiana (2023)	<p>Variabel independen : Kualitas laporan keuangan</p> <p>Variabel dependen : Akuntabilitas kinerja</p>	<p>Sampel : Pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Kota Banda Aceh</p> <p>Metode analisis : analisis regresi linier berganda</p>	<p>Kualitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja</p>
Risya Nurindahsari (2022)	<p>Variabel Independen : Sistem informasi <i>e-government</i></p> <p>Variabel Dependen :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Transparansi pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung 	<p>Sampel : SKPD di Pemerintah Kota Bandung” yang memiliki Sistem Informasi E-Government yang berjumlah 28 SKPD</p> <p>Metode analisis :</p>	<p>1. Sistem informasi <i>e-Government</i> berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>2. Sistem informasi <i>e-government</i> berpengaruh secara</p>

	Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Pemerintah Kota Bandung	uji analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik dengan uji normalitas, uji heteroskedastisitas.	tidak signifikan terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah
Syamsul, Siti Zuhroh (2021)	Variabel Independen : Implementasi <i>e-government</i> Variabel Dependen : Transparansi pengelolaan keuangan daerah	Sampel : 80 pemerintah daerah di Indonesia Metode analisis : uji normalitas, uji heteroskedastisitas, analisis regresi linier sederhana, koefisien determinasi, dan uji T	1. Implementasi <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan berimplikasi positif pada peningkatan transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia.
Intan Indana Zulva, Arik Susbiyani, Diyah Probowulan (2020)	Variabel Independen : 1. Kekayaan pemerintah daerah 2. Opini auditor 3. Rasio tingkat ketergantungan 4. Ukuran pemerintah daerah Variabel Dependen : Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah Melalui <i>E-Government</i> Pemda di Jawa Timur	Sampel : 31 pemerintah daerah di Jawa Timur tahun 2018. Metode Analisis : uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedesitas), dan uji analisis regresi berganda	1. Kekayaan pemerintah daerah, Opini auditor, Rasio tingkat ketergantungan, dan Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemda melalui E-Government pemerintah daerah di Jawa Timur
Sutaryo, Kurniasari Tri Amanu (2020)	Variabel independen : Faktor politik meliputi Profil kepala daerah, ideologi politik, dan tingkat persaingan. Faktor keuangan meliputi likuiditas dan kemandirian daerah Variabel dependen :	Sampel : 309 website pemerintah daerah di Indonesia Metode Analisis : Analisis regresi linear berganda	1. Profil kepala daerah, tingkat persaingan politik dan kemandirian daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi pemerintah daerah; 2. Ideologi politik dan likuiditas keuangan tidak berpengaruh

	Transparansi informasi pemerintah daerah di Indonesia		signifikan terhadap transparansi informasi pemerintah daerah.
Dini Verdania Latif, Saadah, Syakieb Arsalan (2019)	Variabel independen : <i>E-Government (e-Government, e-Budgeting (e-Procurement))</i> Variabel dependen : Transparansi dan Akuntabilitas	Sampel: <i>E-Government</i> Kota Bandung Metode analisis : Metode deskriptif	E-Government kota Bandung menyajikan informasi yang akuntabel dan transparan, walaupun masih sedikit kurang dalam penyempurnaan.
Junita Cestilia Nenabu (2019)	Variabel independen : Kualitas Laporan Keuangan, Kemandirian Daerah, Kepadatan Penduduk, Tingkat Penidikan Variabel dependen : Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah	Sampel : 49 kabupaten dan kota se-Indonesia Metode Analisis : Analisis regresi berganda	1. Kemandirian daerah berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah 2. Kepadatan penduduk, tingkat pendidikan, dan kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah
I Made Pradana Adiputra, Sidharta Utama, Hilda Rossieta (2018)	Variabel Independen : 1. Ukuran pemerintah daerah 2. Kualitas laporan keuangan 3. Tingkat respon pemerintah daerah terhadap regulasi 4. Lingkungan politik di pemerintah daerah Variabel Dependen : Transparansi pemerintah daerah	Sampel : 34 pemerintah daerah (provinsi) di Indonesia pada tahun 2016 Metode Analisis : purposive sampling dan analisis regresi berganda	1. Kualitas laporan keuangan melalui hasil opini audit, Tingkat respon regulasi pemerintah terhadap regulasi, dan Lingkungan politik berpengaruh positif terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia 2. Ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah

Indra Agung Wilopo (2017)	<p>Variabel independen : pendapatan asli daerah, kompleksitas pemerintahan, belanja daerah, rasio pembiayaan utang, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas laporan keuangan</p> <p>Variabel dependen : Akuntabilitas dan Transparansi informasi keuangan daerah</p>	<p>Sampel : 211 pemerintah daerah</p> <p>Metode analisis : analisis regresi logistik dan analisis regresi berganda</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat kesejahteraan masyarakat satu menunjukkan hubungan positif dan signifikan dalam pengungkapan informasi laporan keuangan yang transparan melalui website pemerintah daerah 2. faktor yang lain tidak menunjukkan dampak yang signifikan.
Dian Pratiwi Pitri dan Citra Indah Merina (2017)	<p>Variabel independen : Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah, Rasio Pembiayaan Hutang, Kompleksitas Pemerintah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat</p> <p>Variabel dependen : Tingkat Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah</p>	<p>Sampel : 15 kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Metode analisis :</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja Daerah, Ukuran Pemerintah, dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat berpengaruh positif terhadap Tingkat Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah 2. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Rasio Pembiayaan Hutang, Kompleksitas Pemerintah, dan Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh *E-government maturity* Terhadap *Digital Local Government*

Transparency

Berdasarkan teori keagenan yang menjelaskan hubungan antara dua pihak yaitu masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen terdapat potensi adanya asimetri informasi. Upaya pemerintah daerah dalam mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan publik dilakukan melalui langkah-langkah yang meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah terlibat dalam persaingan untuk meningkatkan sistem informasi pemerintah guna memungkinkan keterlibatan publik. Dengan ketersediaan informasi melalui *e-government* menunjukkan adanya upaya untuk mengurangi masalah asimetri informasi. Sejalan dengan teori legitimasi bahwa adanya *e-government* menjadi upaya pemerintah dalam memperoleh legitimasi publik.

Sistem *e-government* yang canggih dapat meningkatkan transparansi dengan menggunakan teknologi yang andal (Fietkiewicz et al., 2017). Menurut penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024), menyatakan bahwa *e-government maturity* berpengaruh positif terhadap transparansi digital pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Latif et al., 2019) juga menunjukkan adanya hubungan langsung antara tingkat *e-government maturity* dan transparansi di pemerintah daerah. Pernyataan tersebut juga didukung dengan adanya penelitian yang dilakukan oleh

(Pratama, 2023) yang menyatakan bahwa *e-government maturity* berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah, yaitu dengan melalui pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan terwujudnya transparansi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Pada perkembangan era globalisasi dan digitalisasi, penerapan *e-government* dapat mempercepat ketersediaan informasi publik dan memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Penerapan *e-government* yang efektif dapat membantu pemerintah untuk mengoptimalkan layanan publik dan menciptakan transparansi bagi semua pemangku kepentingan. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 : *E-government maturity* berpengaruh positif terhadap *Digital Local Government Transparency*

2.3.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap *Digital Local Government Transparency*

Berdasarkan teori keagenan, masyarakat sebagai prinsipal akan menuntut pemerintah sebagai agen untuk menunjukkan akuntabilitasnya melalui laporan keuangan yang berkualitas. Dalam konteks ini, kualitas laporan keuangan yang baik dengan mendapatkan opini auditor berupa WTP dari BPK menunjukkan bahwa pengungkapan informasi keuangan pada laporan telah dilakukan dengan transparan. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang memiliki kualitas laporan

keuangan yang baik dapat disimpulkan bahwa tingkat transparansi dari pemerintah tersebut juga baik.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh (Adiputra et al., 2018) dan (Octavio & Urumsah, 2024) menunjukan bahwa kualitas laporan keuangan melalui hasil opini audit berpengaruh positif terhadap transparansi digital informasi keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pratama, 2023) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah. Selain itu, (Pratama, 2023) juga menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan yang baik menurut opini audit BPK adalah laporan keuangan yang terpublikasi dan mudah dilihat oleh berbagai pihak, serta menunjukkan adanya kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan.

Kualitas laporan keuangan yang baik mencerminkan informasi yang dapat dipercaya, relevan, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Sehingga laporan keuangan yang berkualitas memungkinkan pengguna laporan keuangan memperoleh gambaran yang jelas dan akurat sesuai dengan kondisi keuangan daerah dan kinerja pemerintah. Dengan demikian, maka penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut.

H2 : Kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*

2.3.3 Pengaruh Sistem Akuntabilitas Terhadap *Digital Local Government Transparency*

Akuntabilitas pemerintah sangat penting untuk mewujudkan hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat(Yuesti et al., 2022). Pengungkapan informasi keuangan dan non keuangan yang transparan merupakan syarat akuntabilitas untuk membangun kepercayaan dan legitimasi dari masyarakat. Sistem akuntabilitas yang efektif mengharuskan pemerintah untuk mengungkapkan semua tindakannya secara transparan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024), menyatakan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi digital pemerintah daerah. Hasil penelitian (Octavio & Urumsah, 2024) menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi oleh pemerintah bergantung pada kualitas sistem akuntabilitas. Kemudian dijelaskan juga bahwa pemerintah dengan memiliki kerangka akuntabilitas yang kuat, pemerintah daerah memiliki keterbukaan yang lebih besar terhadap informasi publik melalui *platform* digital.

Pemerintah dapat memastikan kepercayaan publik dengan menerapkan sistem akuntabilitas yang efektif. Hal ini menunjukan bahwa membangun kerangka akuntabilitas yang kuat akan menjadi dasar bagi transparansi pemerintah, mendorong tanggungjawab yang jelas, dan meningkatkan kepercayaan pemerintah dan publik. Dengan demikian, penelitian ini mengajukan hipotesis sebagai berikut:

H3: Sistem akuntabilitas berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*

2.4 Kerangka Konseptual

Model kerangka penelitian menempatkan *E-government maturity*, Kualitas Laporan Keuangan dan Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah sebagai variabel independen, serta *Digital Local Government Transparency* sebagai variabel dependen. Adapun kerangka dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2. 1 Kerangka Konseptual

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dan menggunakan data sekunder. Data didapatkan melalui laporan keuangan daerah yang telah diaudit oleh BPK dan situs web resmi pemerintah daerah di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada penilaian akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang menerapkan *e-government* dengan memiliki situs web resmi. Jenis penelitian ini adalah *exploratory research*. *Exploratory research* menjelaskan kedudukan-kedudukan variabel yang diteliti terhadap obyek yang diteliti serta berfokus pada sebab dan akibat (kausal) (Sugiyono, 2016). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh *E-government*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap transparansi digital pemerintah daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini merupakan seluruh pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023.

3.2.2 Sampel

Pengambilan sampel ditentukan dengan *non probability sampling* dengan pendekatan *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan kriteria

tertentu. Sehingga didapatkan sampel dalam penelitian ini adalah 36 pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2022 dan 2023. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah pemerintah daerah di Jawa Tengah yang memiliki *e-government* dalam bentuk *website* resmi dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2022 dan 2023 yang telah diaudit.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data yang diambil berasal dari situs web resmi, laporan keuangan, dan laporan akuntabilitas pemerintah daerah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun anggaran 2022 dan 2023 yang telah memenuhi kriteria pengambilan sampel.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode dokumentasi pada pengumpulan data. Pengumpulan data yang akan digunakan berasal dari situs web resmi pemerintah daerah di Jawa Tengah tahun 2023 dengan menggunakan data sekunder. Data Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis aksesibilitas situs web resmi pemerintah daerah dan perkembangan website pemerintah daerah. Selain itu, data pada penelitian ini didapatkan dengan cara mengunduh laporan keuangan dan laporan akuntabilitas pemerintah daerah pada tahun 2022 dan 2023.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel dependen (Y) dan variabel independen (X). Pada penelitian ini variabel dependennya (Y) adalah *digital local*

government transparency, sedangkan variabel independennya (X) terdiri dari *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah.

3.5.1 Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen pada penelitian ini adalah *digital local government transparency*. Transparansi merupakan aspek penting dalam tata kelola yang baik dalam menjaga akuntabilitas dan integritas keuangan pemerintah daerah. Aspek ini mengharuskan pemerintah daerah untuk menyediakan keterbukaan informasi dan kemudahan akses oleh masyarakat terkait pengelolaan keuangan publik. Transparansi digital ini mencakup keterbukaan informasi publik, ketersediaan dan aksesibilitas data keuangan, serta interaksi secara daring antara pemerintah dan masyarakat yang disajikan melalui platform digital seperti *website* resmi pemerintah daerah sehingga dapat diakses secara luas oleh masyarakat.

Peneliti menggunakan sistem *scoring* untuk mengukur variabel ini dengan memberikan penilaian sesuai dengan yang dilakukan. Jika tidak ditemukan indikator didalam situs web resmi pemerintah daerah, maka akan diberikan skor 0. Sebaliknya, jika ditemukan indikator didalam situs web resmi pemerintah daerah maka akan diberi 1 poin. Indikator spesifik yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Indikator Transparansi Digital Pemerintah Daerah

No.	Indikator	Poin	Referensi
1.	Jika website pemerintah daerah dapat ditemukan di halaman pertama pencarian di google dengan hanya mengetikkan nama pemerintah daerah	+1	(Adiputra et al., 2018)
2.	Cukup tiga kali klik atau kurang yang diperlukan untuk melihat informasi keuangan di situs web resmi pemerintah daerah	+1	
3.	Bila data keuangan dapat diunduh dalam berbagai format	+1	
4.	Jika ada informasi keuangan sebelumnya di situs web pemerintah daerah.	+1	

3.5.2 Variabel Independen (X)

Variabel independen pada penelitian ini terdiri dari e-government maturity, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah

1) *E-government maturity*

E-government maturity atau *maturity e-government* merupakan penilaian terhadap keberhasilan implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah fungsi yang ditawarkan oleh *e-government* terkait dengan paparan hasil kinerja secara terbuka dan mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat. Variabel ini menggunakan sistem skoring dengan memberikan nilai sesuai dengan yang dilakukan. Pemberian poin 0 akan diberikan ketika ditemukannya indikator didalam situs web resmi pemerintah daerah. Sebaliknya, pemberian poin 1 akan diberikan ketika ditemukannya indikator didalam situs web resmi pemerintah

daerah. Total poin indikator yang diperoleh akan menjadi skor final. Maksimal skor yang dapat diperoleh adalah 5 poin (Fietkiewicz et al., 2017). Indikator spesifik yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.2

Tabel 3. 2 Indikator *E-Government Maturity*

No.	Indikator	Poin	Referensi
1.	Adanya Kegunaan Partisipasi pada Website	+1	(Fietkiewicz et al., 2017)
2.	Adanya Kegunaan Komunikasi pada Website	+1	
3.	Adanya Kegunaan Katalog pada Website	+1	
4.	Adanya Kegunaan transaksi pada Website	+1	
5.	Adanya Kegunaan Interoperabilitas (integrasi) pada Website	+1	

2) Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan penilaian yang berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI mengenai penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang dituangkan dalam bentuk opini hasil audit pemerintah daerah. Kualitas laporan keuangan yang baik akan memungkinkan untuk mendapat opini WTP oleh BPK RI. Hal itu berarti dengan pengungkap dan keterbukaan informasi yang baik tidak terjadi kesalahan yang material. Opini audit yang dimaksud antara lain Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Wajar (TW), dan Tidak Menyampaikan Pendapat (TMP). Pengukuran variabel kualitas laporan keuangan dengan memberikan nilai 1 untuk WTP dan 0 untuk yang lainnya.

3) Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Sistem akuntabilitas pemerintah daerah dievaluasi melalui sistem pemeringkatan yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB). Pemberian poin dilakukan dengan minimal 1 poin dan maksimal 4 poin. Indikator-indikator yang digunakan dalam mengevaluasi sistem akuntabilitas pemerintah dirinci seperti pada tabel berikut.

Tabel 3. 3 Indikator Sistem Akuntabilitas Pemerintah

No	Indikator	Poin
1.	Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan peringkat AA	4
2.	Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan peringkat BB - A	3
3.	Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan peringkat CC - B	2
4.	Penilaian Akuntabilitas oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dengan mendapatkan peringkat D - C	1

3.5.3 Variabel Kontrol

Penelitian ini menggunakan variabel kontrol yakni Kekayaan Pemerintah Daerah dan Ukuran Pemerintah Daerah.

1) Kekayaan Pemerintah Daerah

Menurut (Mardiasmo, 2018), tingkat kekayaan pemerintah daerah dapat tercermin dari pendapatan asli daerah yaitu jumlah pendapatan yang dihasilkan dari

berbagai sumber di wilayahnya yang dikelola oleh pemerintah. Sumber pendapatan tersebut meliputi pajak, retribusi, hasil pengelolaan aset daerah, serta pendapatan sah lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada penelitian ini, kekayaan pemerintah daerah diukur dengan menggunakan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk melihat besar kecilnya kekayaan suatu pemerintah daerah.

Tabel 3. 4 Indikator Kekayaan Pemerintah Daerah

No	Indikator	Referensi
1.	Kekayaan Pemerintah Daerah = Log Pendapatan Asli Daerah	(Pratama, 2023)

2) Ukuran Pemerintah Daerah

Salah satu indikator ukuran pemerintah daerah adalah total aset yang dikelola oleh pemerintah. Aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah dapat meliputi tanah, gedung, bangunan, dan infrastruktur pemerintah lainnya. Ukuran pemerintah daerah merupakan variabel untuk mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada penelitian ini ukuran pemerintah daerah diukur menggunakan total aset yang terdapat di LKPD, seperti pada penelitian sebelumnya (Adiputra et al., 2018).

Tabel 3. 5 Indikator Ukuran Pemerintah Daerah

No	Indikator	Referensi
1.	Ukuran Pemerintah Daerah = Log Total Aset	(Adiputra et al., 2018)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda yang terdiri dari

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah metode untuk memberikan gambaran mengenai *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency*. Uji statistik deskriptif ini dilaksanakan guna menganalisis data berlandaskan nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, nilai median dan nilai standar deviasi dari suatu variabel (Sugiyono, 2016).

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan dalam penelitian ini dengan maksud untuk memastikan model regresi yang diterapkan sudah sesuai. Perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk menilai akurasi, konsistensi, dan ketidakbiasaan model regresi yang telah direncanakan dalam penelitian, sebelum melakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda. Dengan demikian, uji asumsi klasik menjadi langkah pertama yang penting dalam melakukan analisis regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan pada penelitian ini meliputi:

1) Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengevaluasi apakah distribusi variabel independen, variabel dependen, dan model regresi mempunyai distribusi normal

(Ghozali, 2018). Penelitian ini menggunakan uji *One Sample Kolmogorov Smirnov* (K-S) yang menunjukkan apakah data residual berdistribusi normal atau tidak. Ketetapan uji tersebut adalah sebagai berikut:

- Apabila hasil menunjukkan nilai signifikan $> 0,05$ maka data residual dianggap berdistribusi normal
- Apabila hasil menunjukkan nilai signifikan $< 0,5$ maka data residual dianggap tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi keberadaan korelasi antara dua atau lebih variabel independen dalam suatu model regresi (Hair et al., 2014). Uji ini memiliki tujuan untuk menilai apakah variabel independen saling mempengaruhi secara signifikan atau terdapat masalah multikolinearitas yang dapat mengakibatkan hasil yang tidak tepat. Multikolinearitas dapat diukur menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance* yang didapatkan dari pengolahan data yang memiliki ketentuan sebagai berikut:

- Apabila nilai *tolerance* $\leq 0,10$ dan $VIF \geq 10$, maka terjadi multikolinearitas dalam penelitian.
- Apabila nilai *tolerance* $> 0,10$ dan $VIF < 10$, maka tidak terjadi multikolinearitas dalam penelitian.

3) Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan dalam variasi residual dari satu observasi ke observasi lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Jika variasi residual antar observasi tetap maka disebut homokedastisitas, namun jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2018). Sebuah model regresi yang baik adalah yang memiliki variasi residual yang tetap atau disebut homoskedastisitas. Untuk mengetahui apakah terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian adalah menggunakan uji *White*. Langkah pertama untuk melakukan uji *white* adalah mencari nilai *chi square* dengan mengalikan jumlah observasi (N) dengan nilai R kuadrat menggunakan rumus $N \times R^2$. Kemudian mencari nilai *chi square* tabel dengan menggunakan rumus $Df=k-1$. Kemudian, perhatikan tabel *chi square* untuk menentukan apakah nilai *chi square* hitung lebih kecil atau lebih besar daripada nilai *chi square* tabel (Tafakul et al., 2021). Pengambilan keputusan dalam uji *white* adalah apabila hasil nilai *chi square* hitung lebih kecil daripada nilai *chi square table* maka tidak akan terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2018).

3.6.3 Model Regresi Linear Berganda

Pada penelitian ini pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda, yaitu untuk menguji pengaruh *maturity e-government*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local*

government transparency. Berikut ini adalah persamaan model regresi yang akan digunakan untuk menguji hipotesis dalam penelitian sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \varepsilon$$

Keterangan :

$Y = \text{Digital Local Government Transparency}$

α = Konstanta

$\beta_1 - \beta_4$ = Koefisien Regresi

$X_1 = e\text{-Government Maturity}$

X_2 = Kualitas Laporan Keuangan

X_3 = Sistem Akuntabilitas Pemerintah

X_4 = Kekayaan Pemerintah Daerah

X_5 = Ukuran Pemerintah Daerah

ε = eror



3.6.4 Uji *Goodness of Fit Model*

Goodness of Fit merupakan uji yang dapat mengukur keakuratan fungsi regresi sampel dalam memperkirakan nilai sebenarnya (Ghozali, 2018). *Goodness of Fit Model* secara statistik minimal dapat diukur melalui nilai koefisien determinasi dan nilai statistik F. Apabila nilai uji statistik berada dalam daerah H₀ ditolak,

perhitungan statistik dianggap signifikan. Sebaliknya, apabila nilai uji statistik berada dalam daerah H_0 diterima, maka dianggap tidak signifikan(Ghozali, 2018).

Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi. Ketika variabel independen ditambahkan dalam model regresi, nilai *Adjusted R-Squared* (*Adj R²*) dapat meningkat atau menurun tergantung pada seberapa baik variasi dalam variabel dependen dijelaskan oleh variabel baru tersebut (Ghozali, 2018). Rentang koefisien determinasi adalah antara 0 hingga 1. *Adjusted R²* yang menunjukkan angka yang semakin besar atau mendekati angka 1, berarti model yang digunakan dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen semakin baik. Sedangkan *Adjusted R²* yang semakin kecil atau mendekati angka 0 berarti model semakin lemah dalam menjelaskan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

3.6.5 Uji Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang hasilnya belum tentu sesuai dengan temuan penelitian, serta hipotesis tersebut disampaikan dalam bentuk kalimat pernyataan (Sugiyono, 2016). Pada penelitian ini, hipotesis-hipotesis yang telah diajukan akan diuji menggunakan analisis regresi melalui uji parsial (T). Tujuan dilakukannya analisis regresi adalah untuk mengetahui

pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2018).

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pada penelitian ini uji hipotesis menggunakan uji parsial (Uji T). Uji ini dilakukan untuk memperoleh pemahaman tentang pengaruh variabel independen secara individual dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Pengujian ini menggunakan cara mengevaluasi nilai signifikansi. Apabila nilai signifikansi menunjukkan hasil $\leq 0,05$ maka hipotesis yang telah diajukan diterima yang mengartikan bahwa individual variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai signifikansi $> 0,05$ maka hipotesis ditolak yang mengartikan bahwa individual variabel independen tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependennya (Ghozali, 2018).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini memiliki populasi yang terdiri dari 36 pemerintah daerah baik dalam cakupan provinsi, kabupaten atau kota pada tahun 2022 - 2023. Untuk menentukan sampel, penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* yang dilakukan dengan cara menentukan sampel dengan mempertimbangkan kriteria tertentu dan diperoleh sampel sebanyak 72. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kuantitatif. Tabel 4.1 berikut adalah persebaran data pemerintahan daerah yang diperoleh:

Tabel 4. 1 Tingkat Pemerintah Daerah di Jawa Tengah

No	Tingkat Pemerintah Daerah	Jumlah
1.	Provinsi	1
2.	Kabupaten	29
3.	Kota	6
Jumlah Pemerintah Daerah		36
Jumlah Pemerintah Daerah selama 2 tahun		72

4.2 Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait gambaran data dengan merinci nilai minimum, nilai maximum, nilai *mean*, dn standar

deviasi pada suatu variabel penelitian. Hasil uji statistik deskriptif sebelum dilakukan penghilangan data *outlier* disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_MTEG	72	2	4	2,93	0,613
X2_KLKP	72	0	1	0,99	0,118
X3_SAKT	72	2	3	2,26	0,444
X4_KYPD	72	11,15	13,23	11,668	0,328
X5_UKPD	72	11,51	13,61	12,661	0,310
Y_TRANS	72	2	3	2,92	0,278

Oleh karena adanya data yang tidak normal, maka dilakukan penghilangan data *outlier*. Hasil uji statistik deskriptif setelah adanya penghilangan data *outlier* disajikan dalam tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Hasil Statistik Deskriptif setelah Penghilangan Outlier

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X1_MTEG	68	2	4	2,97	0,598
X2_KLKP	68	0	1	0,99	0,121
X3_SAKT	68	2	3	2,28	0,452
X4_KYPD	68	11,15	13,23	11,680	0,334
X5_UKPD	68	11,51	13,61	12,674	0,315
Y_TRANS	68	2	3	2,97	0,170

Berdasarkan tabel 4.3, maka hasil analisis statistik deskriptif yang telah dilakukan menunjukkan hasil dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Variabel Independen *E-Government Maturity*

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai *mean* atau rata-rata sebesar 2,97. Kemudian memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 4. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,598. Nilai standar deviasi variabel *E-Government Maturity* lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel *E-Government Maturity* memiliki tingkat variasi data yang normal.

b. Variabel Independen Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai *mean* atau rata-rata sebesar 0,99. Kemudian memiliki nilai minimum 0 dan nilai maksimum 1. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,121. Nilai standar deviasi variabel Kualitas Laporan Keuangan lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Kualitas Laporan Keuangan memiliki tingkat variasi data yang normal.

c. Variabel Independen Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai *mean* atau rata-rata sebesar 2,28. Kemudian memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 3. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,452. Nilai standar deviasi variabel Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah memiliki tingkat variasi data yang normal.

d. Variabel Kontrol Kekayaan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai *mean* atau rata-rata sebesar 11,680. Kemudian memiliki nilai minimum 11,15 dan nilai maksimum 13,23. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,334. Nilai standar deviasi variabel kontrol Kekayaan Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel kontrol Kekayaan Pemerintah Daerah memiliki tingkat variasi data yang normal.

e. Variabel Kontrol Ukuran Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai *mean* atau rata-rata sebesar 12,674. Kemudian memiliki nilai minimum 11,51 dan nilai maksimum 13,61. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,315. Nilai standar deviasi variabel kontrol Ukuran Pemerintah Daerah lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel kontrol Ukuran Pemerintah Daerah memiliki tingkat variasi data yang normal

f. Variabel Dependen *Digital Local Government Transparency*

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif , nilai *mean* atau rata-rata sebesar 2,97. Kemudian memiliki nilai minimum 2 dan nilai maksimum 3. Sedangkan untuk nilai standar deviasi sebesar 0,170. Nilai standar deviasi *Digital Local Government Transparency* lebih kecil dibandingkan dengan nilai *mean* atau rata-rata, sehingga hal itu menunjukkan bahwa variabel *Digital Local Government Transparency* memiliki tingkat variasi data yang normal.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Normalitas

Pada penelitian ini, uji normalitas dilaksanakan menggunakan uji *Kolmogorof-Smirnov*. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 0,05 atau 5%, dengan parameter bahwa jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data yang sedang dianalisis memiliki distribusi normal. Berikut adalah hasil uji normalitas yang dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test		
N		Unstandarized Residual
Normal Parameters		.0000000
Normal Parameters		.22330501
Most Extreme Differences		.212
Most Extreme Differences		.163
Most Extreme Differences		-.212
Test Statistic		.212
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan data yang disajikan pada 4.4, menunjukkan bahwa hasil uji normalitas menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* memperoleh nilai sig. sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa data pada penelitian ini tidak berdistribusi normal. Untuk membuat data berdistribusi

normal, maka penelitian ini menghilangkan data *outlier*. Data *outlier* ditentukan dengan menggunakan *Casewise Diagnostics*. Kemudian dilakukan uji normalitas kembali dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* dan memperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov setelah Penghilangan Outlier

One-Sample Kolmogorov Smirnov Test		Unstandarized Residual
N		68
Normal Parameters	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.09228961
Most Extreme Differences	Absolute	.097
	Positive	.070
	Negative	-.097
Test Statistic		.097
Asymp. Sig. (2-tailed)		.190 ^c
d. Test distribution is Normal.		
e. Calculated from data.		
f. Lilliefors Significance Correction.		

Berdasarkan data yang disajikan pada 4.5 menunjukkan bahwa hasil uji normalitas dengan menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* setelah dilakukan penghilangan data *outlier* dengan menggunakan *Casewise Diagnostics* memperoleh nilai sig. sebesar 0,190 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antar variabel independen, dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan *Tolerance*. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas

memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2018). Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel sebagai berikut.

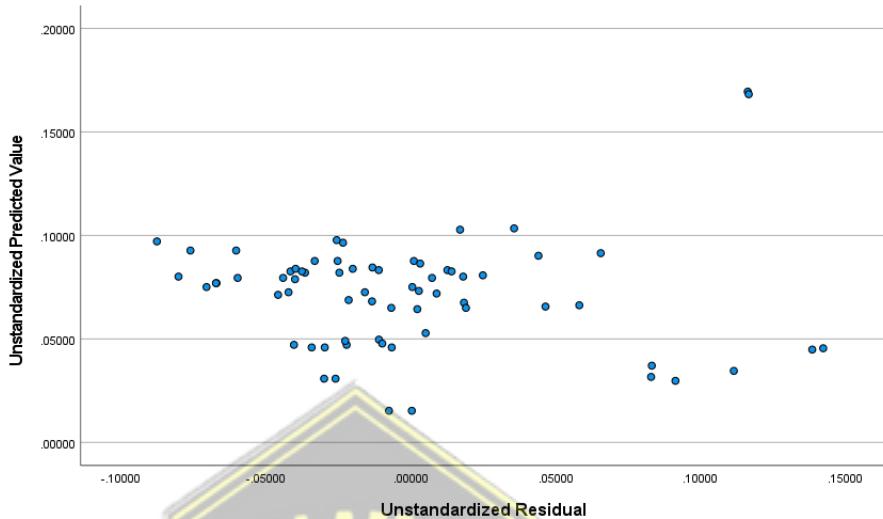
Tabel 4. 6 Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Colinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
MTEG	0,821	1,218
KLKP	0,993	1,007
SAKT	0,676	1,479
KYPD	0,281	3,562
UKPD	0,280	3,566

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel 4.6, variabel *E-Government Matutiry*, Kualitas Laporan Keuangan, Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, dan Ukuran Pemerintah Daerah memperoleh nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai VIF < 10. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa pada model regresi penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas dan tidak ada hubungan antar variabel independen.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengevaluasi apakah terdapat perbedaan varian dari residual antara satu observasi dengan observasi yang lain dalam model regresi (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, uji heteroskedastisitas menggunakan metode Grafik *Scatterplot* dengan melakukan regresi nilai residual terhadap variabel independennya dan didapatkan hasil seperti pada gambar berikut:



Gambar 4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar oleh hasil gambar Scatterplot, data (titik-titik) tersebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menandakan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikiran, terdapat hubungan yang signifikan antara nilai residual dan masing-masing variabel independen.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk menentukan ada atau tidaknya autokorelasi dalam model regresi. Pada penelitian ini, uji autokorelasi menggunakan uji *Durbin Watson* (*DW test*) dengan kriteria pengambilan keputusan $d_U < d < 4 - d_U$. Hasil uji autokorelasi disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.840 ^a	.706	.682	.096	1.805
a.Predictors: (Constant), UKPD, KLKP, MTEG, SAKT, KYPD					
b.Dependent Variable: TRANS					

Berdasarkan data yang disajikan pada 4.7, menunjukkan bahwa nilai DW sebesar 1,805. Nilai dU adalah 1,7678 dan nilai 4-dU adalah 2,2322 yang berarti dU (1,7678) < d (1,805) < 4-dU (1,805). Berdasarkan hasil uji, dapat disimpulkan bahwa data penelitian sudah memenuhi kriteria pengambilan keputusan dan tidak terjadi gejala autokorelasi.

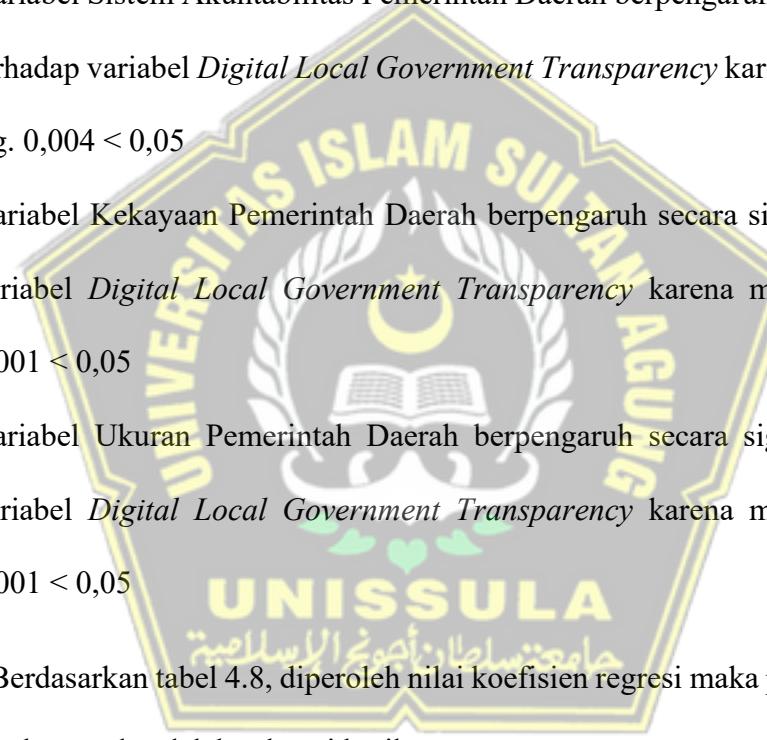
4.3.2 Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Uji Regresi Linear Berganda dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil pengujian disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 8 Hasil Analisis Linear Berganda

	Unstandarized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
(Constant)	-1.445	.521		-2.774	.007
MTEG	-.054	.022	-.188	-2.479	.016
KLKP	-.019	.097	-.014	-.199	.843
SAKT	-.095	.032	-.252	-3.014	.004
KYPD	-.395	.066	-.774	-5.959	<.001
UKPD	.743	.070	1.375	10.576	<.001
a.Dependent Variable: TRANS					

Berdasarkan tabel 4.8, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 
- Variabel *E-Government Maturity* berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *Digital Local Government Transparency* karena memiliki nilai sig. $0,016 < 0,05$.
 - Variabel Kualitas Laporan Keuangan tidak berpengaruh terhadap variabel *Digital Local Government Transparency* karena memiliki nilai sig. $0,843 > 0,05$.
 - Variabel Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *Digital Local Government Transparency* karena memiliki nilai sig. $0,004 < 0,05$
 - Variabel Kekayaan Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *Digital Local Government Transparency* karena memiliki nilai sig. $0,001 < 0,05$
 - Variabel Ukuran Pemerintah Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap variabel *Digital Local Government Transparency* karena memiliki nilai sig. $0,001 < 0,05$
- Berdasarkan tabel 4.8, diperoleh nilai koefisien regresi maka persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = -1,445 - 0,054 X_1 - 0,019 X_2 - 0,095 X_3 - 0,395 X_4 + 0,743 X_5 + \varepsilon$$

Berdasarkan persamaan regresi diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai intersep konstanta senilai $-1,445$ sehingga dapat diinterpretasikan bahwa jika variabel *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, sistem

akuntabilitas pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah adalah sama dengan nol/konstan, maka besarnya nilai *digital local government transparency* adalah sebesar -1,445.

- Nilai koefisien regresi variabel *e-government maturity* sejumlah -0,054, sehingga jika nilai variabel *e-government maturity* naik sebesar satu satuan, maka variabel *digital local government transparency* akan berkurang sebesar -0,054 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.
- Nilai koefisien regresi variabel kualitas laporan keuangan sejumlah -0,019, sehingga jika nilai variabel kualitas laporan keuangan naik sebesar satu satuan, maka variabel *digital local government transparency* akan berkurang sebesar -0,019 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.
- Nilai koefisien regresi variabel sistem akuntabilitas pemerintah daerah sejumlah -0,095, sehingga jika nilai variabel sistem akuntabilitas pemerintah daerah naik sebesar satu satuan, maka variabel *digital local government transparency* akan berkurang sebesar -0,095 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.
- Nilai koefisien regresi variabel kekayaan pemerintah daerah sejumlah -0,395, sehingga jika nilai variabel kekayaan pemerintah daerah naik sebesar satu satuan, maka variabel *digital local government transparency* akan berkurang sebesar -0,395 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.

- Nilai koefisien regresi variabel ukuran pemerintah daerah sejumlah 0,743, sehingga jika nilai variabel ukuran pemerintah daerah naik sebesar satu satuan, maka variabel *digital local government transparency* akan bertambah sebesar 0,743 satuan dengan asumsi konstannya semua variabel independen yang lain.

4.3.3 Hasil Uji Godness of Fit Model

1. Hasil Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan model variabel independen menjelaskan variasi variabel dependen dalam suatu model regresi yang dapat dilihat pada nilai *Adjusted R²*. Hasil pengujian koefisien determinasi disajikan dalam tabel sebagai berikut

Tabel 4. 9 Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.840 ^a	.706	.682	.096
a.Predictors: (Constant), UKPD, KLKP, MTEG, SAKT, KYPD				
b. Dependent Variable: TRANS				

Berdasarkan hasil uji yang telah dilakukan pada tabel 4.9, uji koefisien determinasi memperoleh nilai *Adjusted R²* sebesar 0,682 atau 68,2%. Hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya pengaruh variabel *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, sistem akuntabilitas pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, dan ukuran pemerintah daerah dalam mempengaruhi variabel dependen yaitu *digital local government transparency*

sebesar 68,2%. Sisanya yaitu 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.

2. Uji F

Uji F dilakukan untuk melihat apakah seluruh variabel independen dalam penelitian berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependennya. Hasil uji F pada penelitian ini disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F
1.	Regression	1.371	5	.274	29.780
	Residual	.571	62	.009	
	Total	1.941	67		

a. Dependent Variable: TRANS
b. Predictors: (Constant), UKPD, KLKP, MTEG, SAKT, KYPD

Berdasarkan data pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa hasil dari uji F memperoleh nilai F-hitung sebesar 29,780 dan F tabel sebesar 2,363, dimana F-hitung ($29,780 > 2,363$) dan nilai signifikansi $<0,001 < 0,05$, yang berarti bahwa secara simultan, variabel independen yaitu *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah, serta variabel kontrol yaitu kekayaan pemerintah daerah dan ukuran pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya yaitu *digital local government transparency*.

4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji T dilakukan untuk melihat apakah satu variabel independen secara individual memiliki pengaruh dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil uji T pada penelitian ini disajikan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Hasil Uji T

	Unstandarized Coefficients		t	Sig.	Keputusan
	B	Std. Error			
(Constant)	-1.445	.521	-2.774	.007	
MTEG	-.054	.022	-.188	.479	.016 Diterima
KLKP	-.019	.097	-.014	-.199	.843 Ditolak
SAKT	-.095	.032	-.252	-3.014	.004 Diterima
KYPD	-.395	.066	-.774	-5.959	<.001 Diterima
UKPD	.743	.070	1.375	10.576	<.001 Diterima
a.Dependent Variable: TRANS					

Hasil dari uji hipotesis dalam penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengujian hipotesis pengaruh *e-government maturity* terhadap *digital local government transparency*

Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel *e-government maturity*. Hipotesis pertama pada penelitian ini menyatakan bahwa *e-government maturity* berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*. Nilai koefisien regresi *e-government maturity* sebesar -0,054. Pada tingkat signifikansi sebesar $0,016 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa **H1**

- diterima**, yang berarti bahwa *e-government maturity* berpengaruh signifikan terhadap *digital local government transparency*.
2. Pengujian hipotesis pengaruh kualitas laporan keuangan terhadap *digital local government transparency*
- Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel kualitas laporan keuangan. Hipotesis kedua pada penelitian ini menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*. Nilai koefisien regresi *e-government maturity* sebesar -0,019. Pada tingkat signifikansi sebesar $0,843 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa **H2 ditolak**, yang berarti bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap *digital local government transparency*.
3. Pengujian hipotesis pengaruh sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency*
- Pengujian dilakukan dengan uji signifikansi koefisien regresi dari variabel sistem akuntabilitas pemerintah daerah. Hipotesis ketiga pada penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*. Nilai koefisien regresi *e-government maturity* sebesar -0,095. Pada tingkat signifikansi sebesar $0,004 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa **H3 diterima**, yang berarti bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh signifikan terhadap *digital local government transparency*.

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh *E-Government Maturity* terhadap *Digital Local Government Transparency*

Pada penelitian ini, hipotesis pertama (H1) menguji *e-government maturity* terhadap *digital local government transparency*. Penelitian ini memperoleh hasil nilai koefisien sebesar -0,054 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar 0,016 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel *e-government transparency* berpengaruh terhadap *digital local government transparency* sehingga hipotesis pertama (H1) penelitian ini **diterima**.

Menurut teori keagenan, dimana masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah sebagai agen, memerlukan upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui langkah-langkah transparansi dan akuntabilitas. Transparansi melalui *e-government* mencerminkan sejauh mana pemerintah daerah menyediakan informasi secara terbuka, akurat dan tepat waktu melalui media digital. Aksesibilitas informasi, komunikasi, serta partisipasi publik secara online melalui *website* pemerintah daerah memperkuat persepsi publik terhadap keterbukaan pemerintah secara digital.

Transparansi digital oleh pemerintah daerah akan meningkat sejalan dengan kemajuan *e-government maturity*. Adanya *website* pemerintah daerah yang memiliki fitur yang baik dan lengkap membuat masyarakat dapat dengan mudah mengakses semua publikasi aktivitas pemerintah daerah terhadap aktivitas keuangan maupun non-keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa sistem *e-government*

yang matang menjadi alat bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan transparansi digital pemerintah daerah kepada masyarakat. Sesuai dengan teori legitimasi, bahwa penerapan *e-government* merupakan salah satu cara pemerintah untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan dari masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) dan (Pratama, 2023), yang menyatakan bahwa *e-governement maturity* berpengaruh positif terhadap transparansi digital. Hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Nurindahsari et al., 2022) yang hasilnya menyatakan bahwa *e-government maturity* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah.

4.4.2 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan terhadap *Digital Local Government Transparency*

Hipotesis kedua (H2) penelitian ini menguji kualitas laporan keuangan terhadap *digital local government transparency*. Penelitian ini memperoleh hasil nilai koefisien sebesar -0,019 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar 0,843 atau lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *digital local government transparency* sehingga hipotesis kedua (H2) penelitian ini **ditolak**.

Berdasarkan teori keagenan, hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat dibangun atas dasar kontrak yaitu masyarakat memberikan kepercayaan kepada pemerintah untuk mengelola sumber daya publik. Salah satu cara untuk meminimalkan konflik keagenan adalah terciptanya mekanisme pengelolaan keuangan

dengan transparansi dan akuntabilitas yang ditunjukkan dengan adanya penyusunan laporan keuangan yang berkualitas. Namun, pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laporan keuangan yang dalam hal ini melalui opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, belum tentu diikuti oleh transparansi digital. Hal ini menunjukkan kemungkinan adanya asimetri informasi, meskipun laporan keuangan telah memenuhi standar audit dari BPK. Dengan kata lain, laporan keuangan yang berkualitas lebih bersifat teknis dan formal yang ditujukan untuk kepentingan audit daripada kebutuhan informasi publik, sehingga hal tersebut tidak cukup untuk mendorong transparansi digital secara luas.

Transparansi digital merupakan salah satu cara penting untuk mempertahankan legitimasi dari masyarakat, khususnya pada era keterbukaan informasi publik melalui digital. Namun, berdasarkan pada penelitian ini meskipun pemerintah daerah sudah menyusun laporan keuangan yang berkualitas, hal tersebut belum secara otomatis digunakan sebagai sarana legitimasi melalui transparansi digital. Hal itu dapat terjadi karena pemerintah daerah lebih berfokus pada legitimasi formal terhadap lembaga pemeriksa seperti BPK, bukan kepada masyarakat secara langsung.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh (Zulva et al., 2020) dan (Wilopo, 2017) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap transparansi informasi keuangan pemerintah daerah melalui *website* resmi. Hasil ini penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024) yang menyatakan bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh positif terhadap transparansi digital.

4.4.3 Pengaruh Sistem Akuntabilitas Pemerintah Daerah terhadap *Digital Local Government Transparency*

Pada penelitian ini, hipotesis ketiga (H3) menguji sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency*. Penelitian ini memperoleh hasil nilai koefisien sebesar -0,095 dan mendapatkan hasil regresi pada tingkat signifikansi sebesar 0,004 atau lebih kecil dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh terhadap *digital local government transparency* sehingga hipotesis ketiga (H3) penelitian ini **diterima**.

Sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang diukur menggunakan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan sistem yang dirancang untuk menilai pertanggungjawaban pemerintah atas hasil penggunaan anggaran mulai dari perencanaan hingga evaluasi berbasis kinerja dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Ketika nilai SAKIP dari suatu pemerintah daerah tinggi maka pemerintah daerah tersebut telah menerapkan manajemen berbasis kinerja yang baik, memiliki perencanaan dan pelaporan yang transparan, serta memfokuskan pada pencapaian hasil (*outcome*). Transparansi digital menjadi salah satu wadah penting dalam mendukung akuntabilitas tersebut. Pemerintah daerah yang memiliki komitmen kuat terhadap akuntabilitas publik yaitu dengan nilai SAKIP tinggi, cenderung akan mengembangkan platform digital sebagai sarana dalam menyampaikan informasi kinerja, anggaran serta layanan kepada publik secara terbuka.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori keagenan, dimana akuntabilitas merupakan salah satu cara untuk mengurangi konflik antara pemerintah sebagai agen dan masyarakat sebagai prinsipal. Dengan membangun sistem akuntabilitas yang kuat, maka akan mengurangi asimetri informasi dan memperkuat hubungan kepercayaan antar kedua belah pihak. Dari sisi teori legitimasi, nilai SAKIP yang tinggi menjadi indikator bahwa pemerintah berkomitmen untuk menunjukkan kinerjanya secara terbuka kepada masyarakat luas melalui platform digital. Sehingga hal tersebut menjadi cara pemerintah untuk mempertahankan legitimasi di masyarakat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Octavio & Urumsah, 2024), yang menyatakan bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi digital.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *e-government maturity*, kualitas laporan keuangan, dan sistem akuntabilitas pemerintah daerah terhadap *digital local government transparency*. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *E-government maturity* berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah yang didukung oleh *e-government maturity* yang baik dapat meningkatkan transparansi digital kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sehingga memudahkan aksesibilitas masyarakat dan mewujudkan keterbukaan pemerintah secara digital.
2. Kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap *digital local government transparency*. Artinya kualitas laporan keuangan yang baik menurut opini BPK tidak selalu mencerminkan transparansi digital, karena laporan keuangan yang berkualitas lebih ditujukan untuk kepentingan audit daripada untuk memenuhi kebutuhan informasi publik.
3. Sistem akuntabilitas pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap *digital local government transparency*. Hal ini berarti bahwa sistem akuntabilitas pemerintah daerah yang baik sebagaimana tercermin dalam nilai SAKIP, mendorong

pemerintah untuk mewujudkan transparansi digital melalui perbaikan manajemen kinerja dan penyajian informasi yang lebih terbuka serta mudah diakses oleh publik.

5.2 Implikasi

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan, maka implikasi yang dapat diperoleh berdasarkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penelitian selanjutnya
 - Bagi penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan pengukuran *digital local government transparency* dengan menggunakan indeks transparansi digital yang lebih komprehensif.
 - Bagi penelitian selanjutnya diharapkan peneliti menambahkan variabel potensial independen tambahan seperti faktor politik pemerintah daerah sehingga pemahaman terhadap transparansi digital semakin komprehensif.
2. Bagi pemerintah

Bagi pemerintah penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan dasar untuk masukan dan evaluasi untuk mengembangkan strategi dan kebijakan untuk meningkatkan transparansi digital pemerintah daerah. Peningkatan infrastruktur dan pemanfaatan teknologi informasi, serta manajemen kinerja yang akuntabel merupakan faktor kunci dalam membangun keterbukaan informasi publik secara digital.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini terdapat beberapa keterbatasan antara lain:

1. Beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data ordinal, sehingga menyebabkan kecenderungan data terpusat pada nilai tertentu yang menyebabkan ketidaknormalan distribusi data dan harus melakukan penghapusan outlier.
2. Adanya keterbatasan pada beberapa situs web pemerintah daerah yang tidak dapat diakses sewaktu-waktu sehingga hal ini menjadi tantangan dalam memperoleh jumlah data yang diperlukan. Oleh karena itu, proses pengumpulan data menjadi lebih sulit dan memerlukan tambahan sumber alternatif yang dapat digunakan.
3. Pengukuran *e-government maturity* dan *transparency* berdasarkan *scoring* terhadap *website* pemerintah daerah dapat bersifat subjektif dari perspektif peneliti, sehingga terdapat potensi perbedaan hasil skor antara peneliti dengan peneliti yang lain.

5.4 Agenda Penelitian Mendatang

Berdasarkan hasil dan keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat dijadikan masukan bagi penelitian selanjutnya, yaitu dengan mengembangkan model penentu transparansi digital yang lebih komprehensif. Penelitian selanjutnya dapat merancang model dengan mengintegrasikan beberapa faktor. Hal ini akan memperkaya pemahaman tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat keterbukaan informasi digital. Kemudian penulis juga menyarankan penelitian selanjutnya untuk

dapat melakukan studi wilayah yang berbeda, sehingga dapat memberikan masukan apakah faktor penentu transparansi digital tergantung pada kondisi lokal tertentu.



DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I. M. P., Utama, S., & Rossieta, H. (2018). Transparency of local government in Indonesia. *Asian Journal of Accounting Research*, 3(1), 123–138. <https://doi.org/10.1108/AJAR-07-2018-0019>
- Fietkiewicz, K. J., Mainka, A., & Stock, W. G. (2017). eGovernment in cities of the knowledge society. An empirical investigation of Smart Cities' governmental websites. *Government Information Quarterly*, 34(1), 75–83. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2016.08.003>
- Ghozali, I. (2018). *Applikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hair, J. F. , Black, W. C. , Babin, B. J. , & Anderson, R. E. (2014). *Multivariate Data Analysis (7th ed.)*. Pearson Education Limited.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Latif, D. V., Saadah, & Arsalan, S. (2019). EVALUASI PENERAPAN E GOVERNMENT KOTA BANDUNG DITINJAU DARI TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS. 2(2), 24–31. <https://bandung.go.id/>.
- Lupu, D., & Lazar, C. G. (2015). Influence of e-government on the Level of Corruption in some EU and Non-EU States. *Procedia Economics and Finance*, 20, 365–371. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)00085-4](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)00085-4)
- Mardiasmo. (2006). Perwujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*. *Jurnal Akuntansi Pemerintahan*, 2 (1), 1–24.
- Mardiasmo. (2018). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. ANDI.
- Nurindahsari, R., Akuntansi, J., & Bandung, P. N. (2022). The Influence of Implementation E-Government Information System on Transparency and Accountability of Regional Financial Management (Case Study on Bandung City Government) Rendra Trisyanto. *Indonesian Accounting Research Journal*, 2(3), 251–257.
- Octavio, M. F. R., & Urumsah, D. (2024). Exploring Factors Influencing Digital Transparency in Local Governments: Practices in Indonesia. *Jurnal Dinamika Akuntansi Dan Bisnis*, 11(2), 279–296. <https://doi.org/10.24815/jdab.v11i2.39361>
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (2022).
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) (2010).
- Peraturan Pemerintah (PP) No 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (2005).

- Pratama, B. A. F. (2023). *Pengaruh Kekayaan Pemerintah Daerah, Ukuran Pemerintah Daerah, Kualitas Laporan Keuangan, dan Maturity E-government terhadap Transparansi Informasi Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Saraswati, T., Budiarti, L., & Sudibyo, Y. A. (2019). Publikasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Internet dan Faktor yang Memengaruhinya. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/rab.030138>
- Shabihah, S. A., Ryanindityo, M., Pengayoman, P., & Nurkumalawati, I. I. (2025). *PERAN E-GOVERNANCE SEBAGAI INSTRUMEN PENINGKATAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA THE ROLE OF E-GOVERNANCE AS AN INSTRUMENT TO ENHANCE GOVERNMENT TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY IN INDONESIA*. 5(1). <https://doi.org/10.52617/jaid.v5i1.731>
- Sinaga, Y. F. (2011). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAPORAN KEUANGAN DI INTERNET SECARA SUKARELA OLEH PEMERINTAH DAERAH*. Universitas Diponegoro.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tafakul, B., Rinofah, R., & Mujino. (2021). PENGARUH RETURN ON ASSET, RETURN ON EQUITY, NET PROFIT MARGIN, DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN LQ45 YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2018. *Jurnal Ekobis Dewantara*, 4(1), 11–19. https://doi.org/10.26460/ed_en.v4i1.1766
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (2008).
- Wilopo, I. A. (2017). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas dan Transparansi Informasi Keuangan Daerah Melalui Website*.
- Wu, W., Ma, L., & Yu, W. (2017). Government Transparency and Perceived Social Equity: Assessing the Moderating Effect of Citizen Trust in China. *Administration and Society*, 49(6), 882–906. <https://doi.org/10.1177/0095399716685799>
- Yuesti, A., Adnyana, I. M. D., & Pramesti, I. G. A. A. (2022). Management information systems and the quality of financial statements in local government. *Journal of Public Affairs*, 22(3). <https://doi.org/10.1002/pa.2462>
- Zulva, I. I., Susbiyani, A., & Probowlulan, D. (2020). *DETERMINAN TRANSPARANSI INFORMASI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH MELALUI E-GOVERNMENT PEMERINTAH DAERAH DI JAWA TIMUR*.